RANKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN REJOSO TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN REJOSO

JALAN RAYA BOJONEGORO NOMOR 01
KODE POS 64453

LAMPIRAN XXXIV
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 000.7.2/ /K/411.505/2025
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN REJOSO
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah menerjemahkan secara operasional perencanaan jangka menengah daerah dan perencanaan tahunan daerah ke dalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, serta lokasi dan pendanaan indikatif. Selain itu, Renja Perangkat Daerah menjembati rencana strategis ke rencana operasional ke dalam langkah kebijakan tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya target kinerja rencana strategis jangka menengah.

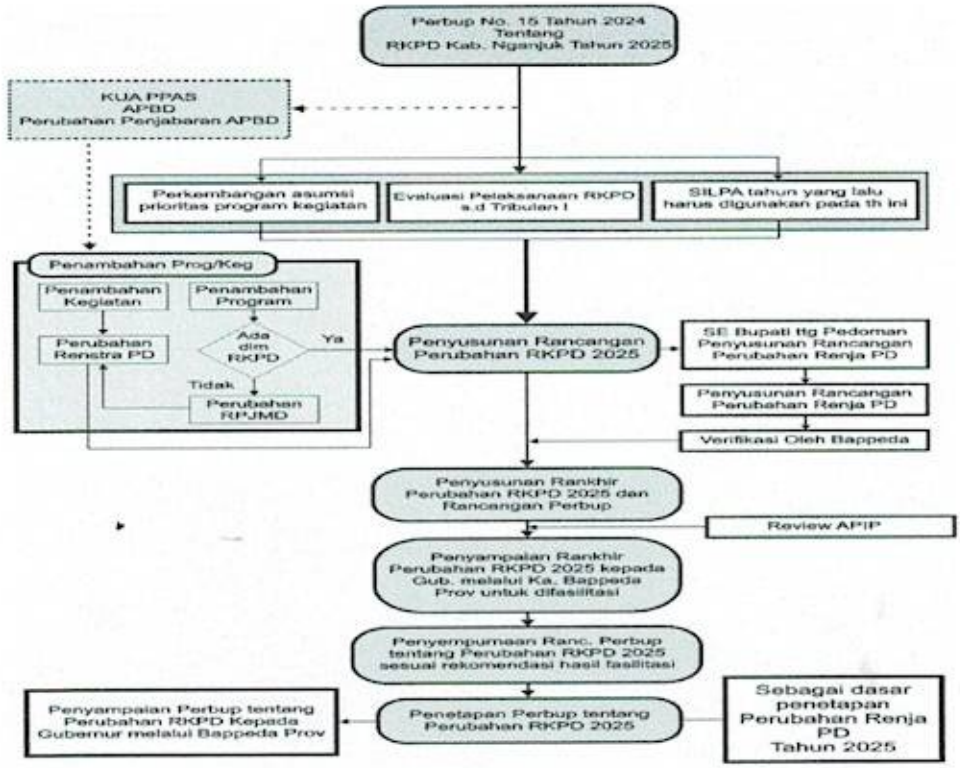
Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan mengingat berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, serta rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah berkenaan;

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan; dan/atau
c. Adanya kebijakan Nasional dan Provinsi yang mewajibkan perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk diakomodir dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mempedomai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan meliputi: (1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II; (2) penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; (3) penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan (4) penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, secara diagramatik diilustrasikan dalam gambar berikut:

Gambar 1.1.
Diagram Alir Perubahan Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD serta didasarkan pada pengendalian dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II tahun berkenaan, pada akhirnya Perubahan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
25. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
27. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.

28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1317 Tahun 2023 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
40. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor1);
43. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
44. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;

45. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
46. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
47. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
48. Peraturan Bupati Nganjuk Nomo 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyesuaian rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah terhadap perkembangan keadaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

a. Menetapkan perubahan program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan I Tahun 2025;
b. Mengakomodir Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah pergeseran APBD yang ditetapkan dalam Perubahan Penjabaran APBD;
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025.
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bagi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;

1.2. Landasan Hukum;

1.3. Maksud dan Tujuan; dan

1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 beserta perubahannya, dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 beserta perubahannya, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun Berkenaan

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025
(Target Berdasarkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026)

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Urusan									
7.01				Bidang Urusan									
7.01	*01*			***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA***	***Nilai Sakip Kecamatan***	***80 Nilai***	**51,95 Nilai**	***75 Nilai***	**61 Nilai**	**100%**	80 Nilai	**61 Nilai**	**100%**
7.01	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD**	**9 Dokumen**	**9 Dokumen**	**9 Dokumen**	**7 Dokumen**	**100%**	27dokumen	**7 Dokumen**	**100%**
7.01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	18 Dokumen	6 Dokumen	100%
7.01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar yang dibuat	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	12 Laporan	4 Laporan	100%
7.01	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Laporan Keuangan SKPD**	29 Dokumen	**13 Dokumen**	**29 Dokumen**	**29 Dokumen**	**100%**	**87dokumen**	**29 Dokumen**	**100%**
7.01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Gaji yang dibayarkan	19 orang/bulan	16 orang/bulan	19 orang/bulan	14 orang/bulan	80%	57Orang/bula	14 orang/bulan	100%

7.01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	
7.01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Perangkat Daerah yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	
7.01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran Perangkat Daerah yang disusun	28 Laporan	12 Laporan	28 Laporan	28 Laporan	100%	
7.01	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Paerangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Paerangkat Daerah**	**0 Dokumen**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**100%**	
7.01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	
7.01	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Laporan Produktifitas Kinerja dan Disiplin Pegawai**	**26 Dokumen**	**26 Dokumen**	**26 Dokumen**	**26 Dokumen**	**100%**	
7.01	01	2.05	**02**	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	0 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	
7.01	01	2.05	**09**	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah belanja honorarium instruktur senam	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	100%	
7.01	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya kebutuhan administrasi umum SKPD**	**7 Dokumen**	**7 Dokumen**	**7 Dokumen**	**7 Dokumen**	**100%**	
7.01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	
7.01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah ATK , mamin pegawai dan alat kebersihan yang tersedia	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	100%	
7.01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	
7.01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang undangan yang tersedia	720 dokumen	720 dokumen	720 dokumen	0	86%	
7.01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu ysng difasilitasi	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	

7.01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN yang melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24 laporan	10 laporan	24 laporan	24 laporan	100%	72 laporan	24 laporan	100%
7.01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola dengan baik	8 dokumen	25 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	24 dokumen	8 dokumen	100%
7.01	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**20 unit**	**9 unit**	**20 unit**	**20 unit**	**100%**	**60 Unit**	**20 unit**	100%
7.01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeler yang diadakan	0 unit	4 unit	60 unit	60 unit	100%	0 unit	60 unit	**100%**
7.01	**01**	**2.07**	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainya	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan.	12 unit	5 unit	10 unit	10 unit	100%	34Unit	10 unit	100%
7.01	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang SKPD**	**48 laporan**	**19 laporan**	**48 laporan**	**48 laporan**	**100%**	**144 laporan**	**48 laporan**	100%
7.01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tenaga jasa administrasi yang dibayar	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	36 laporan	12 laporan	**100%**
7.01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi dan listrik yang tersedia	36 laporan	7 laporan	36 laporan	36 laporan	100%	108 laporan	36 laporan	100%
7.01	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan prasarana Barang Milik Daerah**	69 unit	22 unit	69 unit	69 unit	**100%**		69 unit	100%
7.01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat	4 unit	2 unit	4 unit	4 unit	100%	12 unit	4 unit	**100%**
7.01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebeleur yang dipelihara	40 unit	8 unit	40 unit	-	%	120 unit	-	100%
7.01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	24 unit	10 unit	24 unit	24 unit	100%	72 unit	24 unit	%
7.01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terawat	4 unit	2 unit	4 unit	4 unit	100%		4 unit	100%
7.01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN**	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	36,14%	100%	100%	**100%**	***100%***	100%	100%

				PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	yang dilaksanakan									
7.01	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah kegiatan koordinasi dengan perangkat vertikal.**	3 laporan	1 laporan	3 laporan	3 laporan	**100%**		3 laporan	**100%**
7.01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi / sinergi perencanaan.	3 laporan	2 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	9 laporan	3 laporan	**100%**
7.01	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Jumlah kegiatan koordinsi / sinerg dengan perangkat Daerah terkait pemeliharaan sarana dan prasarana**	2 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	**100%**	**6 dokumen**	2 dokumen	100%
7.01	02	2.03		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah laporan kegiatan bidang sarana dan prasarana yang tersusun	2 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	6 dokumen	2 dokumen	**100%**
7.01	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah warga yang mendapat pelayanan**	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	**100%**	**12 laporan**	4 laporan	100%
7.01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah warga yang mendapat pelayanan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	12 laporan	4 laporan	**100%**
7.01	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**90 %**	**90 %**	**90 %**	**90 %**	**100%**	**90%**	**90 %**	100%
7.01	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**120 lembaga kemasyarakatan**	**N/A**	**120 lembaga kemasyarakatan**	**120 lembaga kemasyarakatan**	**100%**	**360 lmbg kmsytkan**	**120 lembaga kemasyarakatan**	**100%**
7.01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes	120 lembaga kemasyarakatan	120 lembaga kemasyarakatan	120 lembaga kemasyarakatan	120 lembaga kemasyarakatan	100%	1360 lmbg kmsytkan22	120 lembaga kemasyarakatan	**100%**
7.01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta	Jumlah Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	6 dokumen	100%	21 dokumen	6 dokumen	100%

				di Wilayah Kerja Kecamatan	Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								
7.01	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan keertiban umum yang dilaksanakan**	**100%**	**75%**	**100%**	**100%**	**100%**	***100%***	**100%**	100%
7.01	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah kegiatan sinergitas dengan kepolisian dan TNI**	**20 laporan**	**12 laporan**	**20 laporan**	**20 laporan**	**100%**	**60 laporan**	**20 laporan**	**100%**
7.01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas dengan kepolisian dan TNI	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	36 laporan	12 laporan	**100%**
7.01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat	8 laporan	6 Laporan	8 laporan	8 laporan	100%	24 laporan	8 laporan	100%
7.01	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan**	**100 %**	**97,06 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	***100%***	**100 %**	100%
7.01	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan**	**120 lembaga organisasi masyarakat**	**500 orang**	**120 lembaga organisasi masyarakat**	**120 lembaga organisasi masyarakat**	**100%**	**360 lmbg/ormas**	**120 lembaga organisasi masyarakat**	**100%**
7.01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan	800 orang	500 orang	800 orang	800 orang	100%	2400 orang	800 orang	**100%**
7.01	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Prosentasekegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**80%**	**100%**	**100%**	**100%**	***100%***	**100%**	100%
7.01	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**24 desa**	**N/A**	**24 desa**	**24 desa**	**100%**	**24 desa**	**24 desa**	**100%**

7.01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	24 dokumen	24 dokumen	192 dokumen	192 dokumen	100%	192 Dokumen	192 dokumen	**100%**
7.01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegiatan fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	100%	72 Dokumen	24 dokumen	100%

Sumber: Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

No.	Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0 %	Sangat rendah
	Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
	Adanya efisiensi anggaran	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Mengurangi beberapa Anggaran sesuai peraturan yang telah ditetapkan
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	19,3 %	Sangat rendah
	Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
	Adanya efisiensi anggaran	Terdapat risiko	Mengurangi

		kurang tercapainya target kinerja	beberapa Anggaran sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
3.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	90 %	Tinggi
	Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
	Adanya efisiensi anggaran	Tercapainya target kinerja	-
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	90 %	Tinggi
	FaktorPenyebab	ImplikasiTerhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
	Adanya efisiensi anggaran	Tercapainya target kinerja	-
5.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	10 %	Sangat rendah
	FaktorPenyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
	Adanya efisiensi anggaran	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Mengurangi beberapa anggaran sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
6.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5 %	Sangat rendah
	Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
	Adanya efisiensi anggaran	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Mengurangi beberapa anggaran sesuai peraturan yang telah ditetapkan

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama *(core bussiness)* dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Kecamatan Rejoso yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Rejoso terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu:

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
b. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 2.5.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rejoso

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Kinerja (Tri I)Tahun 2025	Catatan Analisis
1	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	75	30%	Nilai Sinergitas belum dapat diukur karena hasil pengukuran bisa didapatkan di Triwulan IV.

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Rejoso

NO	SASASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2025	Realisasi Kinerja (Tri I)Tahun 2025	Catatan Analisis
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	90	89,32	

		(PATEN)			
2.	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	80	81,8%	

Keterangan :

1. Nilai sinergitas diperoleh melalui penilaian pada aplikasi SINCAN
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh melalui penilaian pada aplikasi E-SUKMA JATIM

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam peningkatan kinerja pelayanan Perangkat Daerah dilakukan upaya sebagai berikut:

a) Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
b) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib
c) Melakukan pembinaan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang berkelanjutan

Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapai Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagai berikut:

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	• Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan	• Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih kurang	• Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik • Kekurang selarasan

	pemerintahan kecamatan		antara perencanaan dan penganggaran dengan pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
		• Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib.	• Hubungan kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan • Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa
		• Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan desa belum optimal.	• Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Rejoso, maka dalam pembuatan Renja perlu untuk memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Agar penyusunan rencana kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana kerja yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran

sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakehoders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Dampak Terhadap Pencapaian Program Prioritas Daerah serta Program Nasional/Internasional Yang Mencakup Standar Pelayanan Minimal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Visi pembangunan jangka panjang Kabupatan Nganjuk yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 adalah **"NGANJUK YANG MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA"**, pelaksanaan jangka menengah Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dengan tujuan pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
2. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
4. Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya.

Dalam pencapaian tujuan pembangunan Daerah dimaksud, Kecamatan Rejoso memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan ke-3 serta sasaran strategis daerah Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik .

Dengan dicanangkannya program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program pencapaian 17 Tujuan TPB dan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Secara keseluruhan 17 Tujuan TPB tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.

2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yangberkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia.
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antaranegara.
11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.
14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya lautsecara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut:

a) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;

b) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

c) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.

d) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

e) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.

f) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Sedangkan peluang yang didapatkan dalam peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut:

a. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;

b. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

c. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*); termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat;

d. Serta masyarakat yang aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan

Isu strategis pelayanan Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti dalam perumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah sebagai berikut:

a) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.* Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;

b) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.* Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan *Company/ Coorperate Sosial Resposipility (CSR),* maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

c) *Pelayanan Prima.* Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan

pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

e) *Peningkatan Sinergitas Kecamatan.*

Peningkatan sinergitas kecamatan mendorong kesinambungan organisasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar pemerintahan di wilayah Kecamatan Rejoso guna mempercepat pelaksanaan pembangunan. Serta mengembangkan berbagai kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan program pembangunan guna peningkatan kesejateraan masyarakat. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

e) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah **"Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas".**

Proses review rancangan awal RKPD Tahun 2025 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2025 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut:

Tabel 2.5

Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Rejoso Tahun 2025

Sete	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Sebelum		Sesudah		Keterangan
				Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6			
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec. Rejoso**	***Nilai SAKIP Kecamatan Rejoso***	**80**	**3.500.196.038**	**80**	**2.996.834.471**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**9 Dok**	**52.509.000**	**9 Dok**	**61.058.900**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Rejoso	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	7.040.000	6 Dok	18.100.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	45.469.000	3 Laporan	42.958.900	

7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**29 Dokumen**	**2.837.078.208**	**28 Dokumen**	**2.516.758.000**	
7.01.01.2.01	Penyediaan Gaji	Kec. Rejoso	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang /bulan	2.829.128.208	19 Orang /bulan	2.454.172.000	
7.01.01.2.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Rejoso	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	1.800.000	0 Dokumen	-	
7.01.01.2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.020.000	1 Laporan	32.436.000	
7.01.01.2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	28 Laporan	2.130.000	28 Laporan	30.150.000	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	12 Dokumen	**1.800.000**	0 Dokumen	-	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.800.000	0 Laporan	-	

7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**26 Dokumen**	**24.850.000**	**26 Dokumen**	**28.850.000**	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Rejoso	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	15.400.000	0 Paket	-	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Rejoso	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	9.450.000	20 Orang	28.850.000	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**7 Dokumen**	**163.877.230**	**7 Dokumen**	**159.741.230**	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Rejoso	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	12.795.930	4 paket	12.795.930	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Rejoso	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	68.696.300	7 paket	64.820.300	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Rejoso	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	12 paket	13.210.000	12 paket	9.210.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Kec. Rejoso	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen	6.000.000	720 Dokumen	6.000.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	8.445.000	2 Laporan	8.445.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	24 Laporan	35.430.000	24 Laporan	47.575.000	

			SKPD					
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Rejoso	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8 Dokumen	19.300.000	8 Dokumen	10.895.000	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**20 unit**	**161.796.350**	**20 unit**	**48.000.000**	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebeleur	Kec. Rejoso	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 unit	26.899.150	100 unit	-	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainya.	Kec. Rejoso	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 unit	134.897.200	11 unit	48.000.000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**48 Laporan**	**87.502.000**	**48 Laporan**	**87.502.000**	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	43.752.000,	12 Laporan	43.752.000,	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	43.750.000	36 Laporan	43.750.000	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**69 unit**	**170.783.250**	**69 unit**	**94.924.341**	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Rejoso	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	45.765.250	4 unit	41.847.250	

7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kec. Rejoso	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 unit	2.500.000	40 unit	2.500.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Rejoso	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 unit	8.170.000	24 unit	8.170.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Rejoso	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	114.348.000	5 unit	42.407.091	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Rejoso**	**Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib**	**100 %**	**119.132.400**	**100 %**	**81.978.900**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi/ Sinergi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**3 Laporan**	**87.934.000**	**3 Laporan**	**54.133.000**	
7.01.02.2.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksana-an Kegiatan Pemerintahan Dengan perang-kat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 laporan	87.934.000	3 laporan	54.133.000	
7.01.02.2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**2 Dokumen**	**14.688.400**	**2 Dokumen**	**12.388.400**	

7.01.02.2.03.01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Rejoso	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 dokumen	14.688.400	2 dokumen	12.388.400	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**4 laporan**	**16.510.000**	**4 laporan**	**15.457.500**	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 laporan	16.510.000	4 laporan	15.457.500	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Rejoso**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan**	**90%**	**188.063.600**	**90%**	**195.087.300**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**120 Lembaga kemasyarakatan**	**188.063.600**	**120 Lembaga kemasyarakatan**	**195.087.300**	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Rejoso	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	120 lembaga kemasyarakatan	17.938.400	120 lembaga kemasyarakatan	33.738.400	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan	Kec. Rejoso	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan	7 Dokumen	170.125.200	7 Dokumen	161.348.900	

	Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Rejoso**	**Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani**	**100 %**	**82.450.000**	**100 %**	**58.630.000**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**20 laporan**	**82.450.000**	**20 laporan**	**58.630.000**	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	58.850.000	12 laporan	45.430.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8 laporan	23.600.000	8 laporan	13.200.000	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Rejoso**	**Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**	**100 %**	**116.415.200**	**100 %**	**180.213.900**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan KD**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan**	**120 Lembaga / organisasi kemasyarak**	**116.415.200**	**120 Lembaga / organisasi kemasyaraka**	**180.213.900**	

			pemerintahan di Kecamatan	**atan**		**tan**		
7.01.05.2.01.01	Pembinaan wa-wasan kebang-saan dan keta-hanan Nasional dalam rangka memantabkan pengamalan Pancasila,pelak-sanaan UUD Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerta-tahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Kec. Rejoso	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 orang	116.415.200	400 orang	180.213.900	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Rejoso**	**Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	**100 %**	**89.197.600**	**100 %**	**96.798.200**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	**24 Desa**	**89.197.600**	**24 Desa**	**96.798.200**	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Rejoso	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	192 Dokumen	46.422.600	192 Dokumen	60.623.200	
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Rejoso	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatiff	24 Dokumen	42.775.000	24 Dokumen	36.175.000	
					4.095.454.838		**3.609.542.771**	

Sumber: Hasil Analisis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

2.3.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	
		NIHIL			

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2024

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dengan mempertimbangkan isu strategis, target, dan realisasi pencapaian sasaran daerah dalam RPD 2024-2026 serta pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Nganjuk, dapat disusun Prioritas Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025. Adapun tema RKPD Tahun 2025 adalah terwujudnya ‣ kemandirian ekonomi, kemantapan infrastruktur, masyarakat yang sejahtera, aman, harmonis, berkepribadian dan berkebudayaan serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi pada Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan social
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan bagi segenap lapisan masyarakat
3. Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sector unggulan Kabupaten Nganjuk
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, tata Kelola sumber day air, lingkungan hidup dan peningkatan sarana prasarana dasar permukiman
5. Meningkatkan kualitas Pendidikan
6. Meningkatkan stabilitas keamanan, keamanan, ketentrman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana
7. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan dna pelayanan public dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan Kecamatan.

Tabel 3.1

Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi 2025 (Rp.)
1	Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	3.609.542.771

Tabel 3.2
Sasaran Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Alokasi 2025 (Rp)
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	90	3.370.698.871
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	85 %	238.843.900

3.1. **Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah "Meningkatnya Birokrasi Yang Akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang Prima", adapun sasaran yang akan dicapai adalah "1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN); 2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan", dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	78 Indeks

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	90 Indeks
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan	85 %

Sumber: Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

3.1. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

SIPD

TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (14-13)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN REJOSO							4.350.434.838,00	4.343.937.800,00	3.839.842.771,00	-485.913.067,00							4.156.784.588,00	
	7	LINEUR KEWILAYAHAN							4.660.434.838,00	4.343.937.800,00	3.839.842.771,00	-485.913.067,00							4.156.784.588,00	
	7.01	KECAMATAN							4.660.434.838,00	4.343.937.800,00	3.839.842.771,00	-485.913.067,00							4.156.784.588,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Rejoso				80 Nilai	80 Nilai	3.353.194.238,00	3.338.879.094,00	2.996.834.471,00	145.362.421,00							3.845.156.659,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun				5 dokumen	5 dokumen	52.509.500,00	50.999.500,00	61.856.900,00	9.346.900,00			Meningkatnya reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pit Kab : Terbentuknya Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pit Kab : Terbentuknya Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab.Nganjuk		52.901.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	7.349.000,00	21.200.000,00	19.130.000,00	11.980.000,00	Kab. Nganjuk, Rejoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pit Kab : Terbentuknya Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pit Kab : Terbentuknya Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.342.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	45.466.500,00	45.466.500,00	42.856.900,00	-2.515.100,00	Kab. Nganjuk, Rejoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pit Kab : Terbentuknya Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pit Kab : Terbentuknya Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			45.466.500,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				29 Dokumen	29 Dokumen	2.837.879.338,00	2.340.193.535,00	2.515.704.900,00	-320.330.308,00			Meningkatnya reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pit Kab : Terbentuknya Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pit Kab : Terbentuknya Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab.Nganjuk		2.776.344.900,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/Jiwa	19 Orang/Jiwa	3.076.118.258,00	2.381.949.334,00	2.494.173.900,00	-574.958.908,00	Kab. Nganjuk, Rejoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pit Kab : Terbentuknya Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pit Kab : Terbentuknya Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			2.771.059.308,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	9 Dokumen	1.806.500,00	1.800.000,00	6,00	-1.806.500,00	Kab. Nganjuk, Rejoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pit Kab : Terbentuknya Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pit Kab : Terbentuknya Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.806.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.035.000,00	4.010.000,00	32.434.000,00	28.416.000,00	Kab. Nganjuk, Rejoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pit Kab : Terbentuknya Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pit Kab : Terbentuknya Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			4.231.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				24 Laporan	24 Laporan	2.130.000,00	2.130.000,00	30.150.000,00	28.020.000,00	Kab. Nganjuk, Rejoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pit Kab : Terbentuknya Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pit Kab : Terbentuknya Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			2.194.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.3.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				12 dokumen	9 dokumen	1.806.500,00	1.800.000,00	0,00	-1.806.500,00			Meningkatnya reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pit Kab : Terbentuknya Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pit Kab : Terbentuknya Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab.Nganjuk		1.806.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	9 Laporan	1.806.500,00	1.800.000,00	0,00	-1.806.500,00	Kab. Nganjuk, Rejoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pit Kab : Terbentuknya Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pit Kab : Terbentuknya Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.806.000,00	KECAMATAN REJOSO

NO.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (14-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				29 dokumen	29 dokumen	34.950.000,00	34.950.000,00	28.950.000,00	-6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pil Kab : Terbebas Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pil Kab : Terbebas Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab.Nganjuk		33.547.500,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.05.0002	Pengelolaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	0 Paket	15.400.000,00	22.800.000,00	0,00	-15.400.000,00	Kab. Nganjuk, Rejoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pil Kab : Terbebas Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pil Kab : Terbebas Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			23.625.500,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.05.0003	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	5.400.000,00	12.600.000,00	28.800.000,00	19.400.000,00	Kab. Nganjuk, Rejoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pil Kab : Terbebas Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pil Kab : Terbebas Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.663.500,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah				7 dokumen	7 dokumen	163.871.230,00	184.726.780,00	158.741.230,00	-4.130.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pil Kab : Terbebas Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pil Kab : Terbebas Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab.Nganjuk		187.738.417,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	12.795.830,00	12.795.830,00	12.795.830,00	0,00	Kab. Nganjuk, Rejoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pil Kab : Terbebas Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pil Kab : Terbebas Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			13.441.463,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	68.696.300,00	69.045.850,00	64.821.930,00	-3.874.370,00	Kab. Nganjuk, Rejoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pil Kab : Terbebas Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pil Kab : Terbebas Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			73.679.439,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	13.210.000,00	13.210.000,00	8.210.000,00	-4.000.000,00	Kab. Nganjuk, Rejoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pil Kab : Terbebas Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pil Kab : Terbebas Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			13.870.500,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				725 Dokumen	720 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Rejoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pil Kab : Terbebas Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pil Kab : Terbebas Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.320.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Layanan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Layanan	2 Layanan	8.445.500,00	8.445.500,00	8.445.500,00	0,00	Kab. Nganjuk, Rejoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pil Kab : Terbebas Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pil Kab : Terbebas Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.858.200,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (SKPD)				24 Layanan	24 Layanan	35.430.500,00	35.430.000,00	47.575.500,00	12.145.000,00	Kab. Nganjuk, Rejoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pil Kab : Terbebas Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pil Kab : Terbebas Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			37.851.950,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.06.0010	Pemeliharaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Berkenaan/Berkurang (13-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pendayagunaan Aset/ Dinamisasi pada SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	10.370.000,00	10.000.000,00	10.695.000,00	-8.695.000,00	Kab. Nganjuk, Rejoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	PI Kab : Terlaksana Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik PI Kab : Terlaksana Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			14.695.550,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.07	Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(Delete)) Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disertakan				20 Unit	20 Unit	101.790.340,00	238.290.550,00	48.800.000,00	-113.790.340,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	PI Kab : Terlaksana Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik PI Kab : Terlaksana Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab.Nganjuk		261.363.100,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Perlengkapan Mebel yang Disediakan				100 Unit	0 Unit	25.899.150,00	25.899.150,00	0,00	-25.899.150,00	Kab. Nganjuk, Rejoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	PI Kab : Terlaksana Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik PI Kab : Terlaksana Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			80.850.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	0 Unit	134.997.205,00	231.997.205,00	44.800.000,00	-46.997.205,00	Kab. Nganjuk, Rejoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	PI Kab : Terlaksana Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik PI Kab : Terlaksana Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			140.513.100,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				48 Laporan	48 Laporan	87.922.000,00	87.922.000,00	87.922.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	PI Kab : Terlaksana Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik PI Kab : Terlaksana Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab.Nganjuk		86.823.100,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	43.752.000,00	43.752.000,00	43.752.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Rejoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	PI Kab : Terlaksana Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik PI Kab : Terlaksana Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			45.435.900,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				39 Laporan	39 Laporan	43.750.000,00	43.750.000,00	43.750.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Rejoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	PI Kab : Terlaksana Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik PI Kab : Terlaksana Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			51.187.500,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara				58 Unit	58 Unit	170.753.250,00	304.642.341,00	94.824.341,00	-75.928.909,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	PI Kab : Terlaksana Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik PI Kab : Terlaksana Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab.Nganjuk		252.521.253,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	45.790.250,00	57.790.250,00	47.847.250,00	-9.918.000,00	Kab. Nganjuk, Rejoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	PI Kab : Terlaksana Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik PI Kab : Terlaksana Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			47.567.948,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				40 Unit	42 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Rejoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	PI Kab : Terlaksana Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik PI Kab : Terlaksana Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			4.725.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	8.170.000,00	8.170.000,00	8.170.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Rejoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	PI Kab : Terlaksana Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik PI Kab : Terlaksana Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.578.500,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Bahana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Berlambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	114.348.000,00	236.207.091,00	42.407.091,00	-71.940.909,00	Kab. Nganjuk, Rejoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pft Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pft Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik				191.195.715,00	KECAMATAN REJOSO
2.	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib**				**100 %**	**100 %**	**110.133.400,00**	**110.133.400,00**	**81.879.600,00**	**-27.771.480,00**							**151.360.818,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 laporan	3 laporan	67.934.000,00	67.934.000,00	54.130.000,00	-13.804.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pft Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pft Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab.Nganjuk		80.980.700,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 Laporan	3 Laporan	67.934.000,00	67.934.000,00	54.130.000,00	-13.804.000,00	Kab. Nganjuk, Rejoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pft Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pft Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik				80.980.700,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah dokumen koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum				2 Dokumen	2 Dokumen	14.595.400,00	14.595.400,00	12.368.400,00	-2.300.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pft Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pft Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab.Nganjuk		5.867.830,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	14.595.400,00	14.595.400,00	12.368.400,00	-2.300.000,00	Kab. Nganjuk, Rejoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pft Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pft Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik				5.867.830,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat				4 Laporan	4 Laporan	18.510.000,00	18.510.000,00	13.457.500,00	-1.052.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pft Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pft Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab.Nganjuk		14.502.380,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 Laporan	4 Laporan	18.510.000,00	18.510.000,00	13.457.500,00	-1.052.500,00	Kab. Nganjuk, Rejoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pft Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pft Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik				14.502.380,00	KECAMATAN REJOSO
3.	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan**				**90 %**	**90 %**	**169.963.500,00**	**169.963.500,00**	**160.997.300,00**	**-12.735.574,00**							**175.038.436,94**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan				120 Lembaga kemasyarakatan	120 Lembaga kemasyarakatan	169.963.500,00	169.963.500,00	160.997.300,00	7.621.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pft Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pft Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab.Nganjuk		175.038.436,94	KECAMATAN REJOSO
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				120 Lembaga kemasyarakatan	120 Lembaga kemasyarakatan	17.838.400,00	17.838.400,00	23.708.400,00	15.800.200,00	Kab. Nganjuk, Rejoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pft Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pft Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik				14.535.328,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				7 Dokumen	7 Dokumen	170.125.200,00	170.125.200,00	161.348.900,00	-8.776.300,00	Kab. Nganjuk, Rejoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pft Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pft Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik				160.627.710,00	KECAMATAN REJOSO
4.	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pelmasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani**				**100 %**	**100 %**	**82.450.000,00**	**82.450.000,00**	**38.630.000,00**	**-28.010.340,00**							**82.830.960,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (14-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.3.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil koordinasi untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum				20 Laporan	20 Laporan	82.450.000,00	82.450.000,00	58.830.000,00	-23.620.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, terkoita, judi, dan penyalahgun.	Pit Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pit Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab.Nganjuk		82.830.960,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.04.3.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	58.850.000,00	58.850.000,00	45.430.000,00	-13.420.000,00	Kab. Nganjuk, Rejoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, terkoita, judi, dan penyalahgun.	Pit Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pit Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			28.903.140,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.04.3.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				8 Laporan	8 Laporan	23.600.000,00	23.600.000,00	15.300.000,00	-10.400.000,00	Kab. Nganjuk, Rejoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, terkoita, judi, dan penyalahgun.	Pit Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pit Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			25.927.630,00	KECAMATAN REJOSO
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**119.415.205,00**	**140.415.205,00**	**140.213.805,00**	**-6.417.205,00**							**110.798.800,00**	
	7.01.05.3.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan				120 lembaga ormas/sosial kemasyarakat	120 lembaga ormas/sosial kemasyarakat	119.415.205,00	140.415.205,00	140.213.805,00	83.798.705,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, terkoita, judi, dan penyalahgun.	Pit Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pit Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab.Nganjuk		110.798.800,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.05.3.01.0001	Pemberian Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memasyarakatkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemantapan dan Pemolibaraan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberian Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memasyarakatkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemantapan dan Pemolibaraan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia				400 Orang	400 Orang	119.415.205,00	140.415.205,00	140.213.805,00	83.798.705,00	Kab. Nganjuk, Rejoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, terkoita, judi, dan penyalahgun.	Pit Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pit Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			110.798.800,00	KECAMATAN REJOSO
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUMUMAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**				**100 %**	**100 %**	**88.167.800,00**	**207.167.800,00**	**96.768.200,00**	**+8.598.374,00**							**79.569.826,00**	
	7.01.06.3.01	Fasilitasi, Pembinaan dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang				24 Desa	24 Desa	88.167.800,00	207.167.800,00	96.768.200,00	7.600.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, terkoita, judi, dan penyalahgun.	Pit Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pit Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab.Nganjuk		71.569.226,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.06.3.01.0003	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				152 Dokumen	152 Dokumen	48.422.800,00	194.422.800,00	90.623.200,00	14.200.400,00	Kab. Nganjuk, Rejoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, terkoita, judi, dan penyalahgun.	Pit Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pit Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			28.048.230,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.06.3.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				24 Dokumen	24 Dokumen	42.775.000,00	42.775.000,00	28.175.205,00	-6.600.205,00	Kab. Nganjuk, Rejoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, terkoita, judi, dan penyalahgun.	Pit Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik Pit Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			43.500.000,00	KECAMATAN REJOSO
		J U M L A H							**4.566.454.636,00**	**4.344.837.805,00**	**3.929.542.771,00**	**-402.912.557,00**							**4.135.194.550,00**	

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2025 baik Program, Kegiatan maupun Subkegiatan mengalami perubahan dari sisi pagu Anggaran. Perubahan tersebut dilakukan guna melakukan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Bupati Nganjuk Nomor 189 Tahun 2025.

Tabel 3.4
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
		Uraian (Output)	Target	
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	***Nilai SAKIP Kecamatan Rejoso***	**80**	**2.996.834.471**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**9 Dok**	**61.058.900**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	18.100.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	42.958.900
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan keuangan yang dilaksanakan**	**29 Dokumen**	**2.516.758.000**
	Penyediaan Gaji	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang /bulan	2.454.172.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	32.436.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan	28	30.150.000

	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	0 Dokumen	**0**
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**26 Dokumen**	**28.850.000**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	28.850.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**7 Dokumen**	**159.741.230**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	12.795.930
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 paket	64.820.300
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	12 paket	9.210.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen	6.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	8.445.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	47.575.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	8 Dokume	10.895.000

		Dinamis pada SKPD	n	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**20 unit**	**48.000.000**
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 unit	0
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainya.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 unit	48.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang SKPD**	**48 Laporan**	**87.502.000**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	43.752.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	43.750.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**69 unit**	**94.924.341**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	41.847.250
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 unit	2.500.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 unit	8.170.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	42.407.091
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib**	**100 %**	**81.978.900**
	Koordinasi/ Sinergi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	**Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**3 Laporan**	**54.133.000**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksana-an Kegiatan Pemerintahan Dengan perang-kat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	3 laporan	54.133.000

	Instansi Vertikal Terkait	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**2 Dokumen**	**12.388.400**
	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 dokumen	12.388.400
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**4 laporan**	**15.457.500**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 laporan	15.457.500
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan**	**90%**	**195.087.300**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**120 Lembaga kemasyarakatan**	**195.087.300**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	120 lembaga kemasyarakatan	33.738.400
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7 Dokumen	161.348.900
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani**	**100 %**	**58.630.000**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**20 laporan**	**58.630.000**

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	45.430.000
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8 laporan	13.200.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**	**100 %**	**180.213.900**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan KD	**Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**	**120 Lembaga / organisasi kemasyarakatan**	**180.213.900**
	Pembinaan wa-wasan kebang-saan dan keta-hanan Nasional dalam rangka memantabkan pengamalan Pancasila,pelak-sanaan UUD Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerta-tahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 orang	180.213.900
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	**100 %**	**96.798.200**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	**Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	**24**	**96.798.200**
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	192 Dokumen	60.623.200
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatiff	24 Dokumen	36.175.000
				3.609.542.771

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 diharapkan memperhatikan keselarasan dan konsistensi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 beserta perubahannya, sehingga target kinerja Tahun 2025 dapat dicapai dengan optimal.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai implementasi pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
   c. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

Rejoso, 12 JUNI 2025

CAMAT REJOSO

TEGUH OVI ANDRIYANTO,SIP
Pembina TK.I
NIP.19730906 199303 1006

LAPORAN TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL REVIU APIP TERHADAP RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA KECAMATAN REJOSO TAHUN 2025

KECAMATAN REJOSO

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1	- Penulisan BAB 2 Sub-Bab Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah memiliki penomoran Ganda dengan Sub-Bab Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah - Mencantumkan Nomor Tabel pada Tabel pada BAB 2 setelah Tabel 2.3 Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran	V V		
2	- Sub Bab 2.2. Agar melakukan pengukuran Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Rejoso atas Target IKU dan IKK.	V		

Nganjuk, 12 Juni 2025

CAMAT REJOSO

TEGUH OVI ANDRIYANTO,SIP
PEMBINA TK I
NIP.19730906 199303 1 006